

# STRATEGI PARTAI HANURA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI BAWAH KEPEMIMPINAN OESMAN SAPTA ODANG

Mohammad Raihan Fahrezy\*), Kushandajani\*\*)

Email: [raihanfahrezi1307@gmail.com](mailto:raihanfahrezi1307@gmail.com)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www/fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam menghadapi Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada merosotnya perolehan suara Partai Hanura dalam Pemilu 2019 yang mengakibatkan partai tersebut tidak lolos ke Senayan, serta konflik internal yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan dari Wiranto ke OSO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi politik Hanura sebelum dan saat kepemimpinan OSO dalam rangka mengembalikan elektabilitas partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 10 narasumber internal Partai Hanura, termasuk Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan pengurus pusat lainnya. Analisis penelitian mengacu pada konsep manajemen partai politik yang mencakup tiga indikator utama: organisasi, kepemimpinan, dan kaderisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kepemimpinan OSO, Partai Hanura masih bergantung pada figur sentral Wiranto dengan pendekatan yang cenderung sentralistik. Strategi partai di bawah kepemimpinan OSO mengalami transformasi melalui penerapan prinsip 5S (struktur, sistem, skill, speed, dan target), pelibatan kader muda dan perempuan, serta penguatan komunikasi top-down. OSO juga berupaya membangun kembali kepercayaan publik melalui pendekatan partisipatif dan kaderisasi yang berbasis integritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi politik Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terbuka dibandingkan masa sebelumnya, namun tetap menghadapi tantangan besar dalam merebut kembali kepercayaan pemilih di Pemilu 2024.

**Kata Kunci:** Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, Strategi Politik, Pemilu, Manajemen Partai Politik, Sistem Kepartaian.

## ABSTRACT

*This study examines the strategy of the People's Conscience Party (Partai Hanura) in facing the 2024 General Election under the leadership of Oesman Sapta Odang (OSO). The background of this research stems from the party's electoral decline in the 2019 election, which resulted in the loss of parliamentary representation, as well as internal conflicts that emerged following the leadership transition from Wiranto to OSO. The purpose of this research is to analyze Hanura's political strategy before and during OSO's leadership in its efforts to restore electoral strength. This research uses a qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews and document analysis. The subjects of the study consisted of 10 internal figures from Hanura, including the General Chairman, Secretary General, and other central board members. The analysis framework is based on the concept of party management, emphasizing three main*

*indicators: organization, leadership, and cadre development. The findings indicate that prior to OSO's leadership, Hanura's strategy heavily relied on the central figure of Wiranto, with a top-down approach. Under OSO's leadership, however, the party adopted a more structured and participative strategy through the implementation of the 5S principles (structure, system, skill, speed, and target), greater involvement of youth and women, and the strengthening of top-down communication. OSO also aimed to rebuild public trust through participatory approaches and integrity-based cadre development. The study concludes that Hanura's political strategy under OSO reflects a more systematic and inclusive direction compared to previous periods, although significant challenges remain in regaining voter trust for the 2024 election.*

**Keywords:** Hanura Party, Oesman Sapta Odang, Political Strategy, General Election, Party Management, Party System.

## **PENDAHULUAN**

Partai politik di negara berkembang lebih banyak dimanfaatkan atau menginginkan partai politik tersebut menjadi organisasi yang dapat mempersatukan semua golongan, suku, agama dan latar belakang yang berbeda dalam sebuah negara yang satu. Partai politik didambakan dapat menyatukan seluruh kekuatan bangsa dan memajukan jati diri bangsa, menangani kemiskinan dan keterbelakangan terutama di negara-negara yang baru merdeka, karena kemiskinan dan kesetaraan di negara berkembang merupakan masalah yang mendesak dan sangat berisiko. Menurut Undang-Undang tentang Partai Politik, tujuan umum partai politik adalah melindungi dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPR RI, 2008). Dalam Undang-undang juga mewajibkan partai politik untuk menciptakan suasana yang mendukung dan kondusif demi tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi kepentingan masyarakat.

Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan sebutan Pemilu memiliki definisi yang identik antara bergantinya pemimpin yang lama dengan beberapa calon pemimpin yang baru dan juga bergantinya gaya kepemimpinannya juga. Pada hal ini, partai politik cenderung memprioritaskan para elit politik dibandingkan untuk kepentingan bangsa dan negara (Hutagalung, 2017). Meskipun begitu, partai politik juga

memberikan kesempatan untuk mengajak kepada masyarakat yang tertarik untuk ikut serta dan mendaftarkan dirinya menjadi anggota partai politik. Merekrut calon-calon anggota menjadi sebuah hal yang menjadi pacuan utama dalam mempersiapkan calon pemimpin yang akan memimpin terselenggaranya pemerintahan yang baik, ideal, adil dan bijaksana pada masa yang akan datang.

Secara teoritis, pemilu disebut-sebut sebagai fase pertama dari banyak fase yang berbeda dalam keberlangsungan negara yang demokratis. Oleh karena itu, pemilu merupakan instrumen penggerak metode pola politik yang ada di Indonesia. Hingga saat ini pemilihan umum masih disebut sebagai peristiwa penting kenegaraan. Memang benar, pemilihan umum secara langsung menyangkut semua orang. Melalui pemilihan umum, masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat atau keinginannya mengenai politik atau mengenai mekanisme negara.

Partai Hanura dibentuk dan berdiri pada 21 Desember 2006 yang pada awalnya partai tersebut diketuai oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto dan saat ini diketuai oleh Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang atau akrab yang dipanggil OSO. Pada awal mula partai ini berdiri, pada tahun 2009 yang

dibarengi dengan pemilu legislatif pada saat itu, Partai Hanura berhasil mendapatkan 17 kursi di senayan dan memperoleh suara sebanyak 3.922.870 atau setara dengan (3,77%). 5 tahun berlalu, pada pemilu 2014 Hanura kembali mendapatkan 16 kursi di senayan dan memperoleh suara sebanyak 6.579.498 atau setara dengan (5,26%). Setelah itu, partai Hanura mengalami kegagalan ketika pada pemilu 2019 yang gagal merebut kursi di Senayan dikarenakan persentasi ambang batas parlemen dibawah 4% dan hasil suara yang didapatkan hanya 2.161.507 atau sekitar dengan (1,54%).

Hadirnya Hanura di tengah-tengah masyarakat merupakan sebagai bentuk nyata yang sesuai dengan namanya “Hati Nurani Rakyat” memiliki tujuan yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Dengan ketanggapannya partai ini, aspirasi dan berbagai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat menjadikan dipercaya oleh publik karena akan kepekaannya yang menyalurkan suara rakyat kepada para pembuat kebijakan. Tidak hanya itu, konsistensi Hanura di tengah masyarakat membuat keputusan-keputusan yang diberikan oleh para pembuat kebijakan memberikan keuntungan kepada rakyat.

Dari awal berdirinya partai Hanura pada tanggal 21 Desember 2006 sampai dengan sekarang, terhitung hanya sedikit kadernya yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dapat dikatakan partai Hanura merupakan partai politik yang paling suci dari kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat. Walaupun partai Hanura masih terbilang partai kecil, penerapan sosialisasi kepada setiap anggota partai tersebut menunjukkan nilai tingkat yang baik dan profesional. Partai Hanura juga tidak pernah memberikan perkataan ataupun penilaian negatif terhadap partai-partai lain serta tidak pernah menganggap remeh lawan partainya.

Konflik internal menjadi faktor sangat sakral yang membuat Hanura menjadi gagal dan mengakibatkan tidak lolos di Senayan, perselisihan antara Mantan Ketua Umum yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto yang juga merupakan salah satu tokoh utama yang berperan penting dalam keberlangsungan berdirinya partai tersebut dengan Ketua Umum Hanura saat ini yaitu Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang. Tidak dapat disangka dengan adanya konflik perselisihan internal yang terjadi menyebabkan dampak dan akibat yang serius bagi organisasi partainya. Wiranto dan Oesman Sapta Odang yang dimana kedua orang tersebut memiliki masing-masing kepengurusan yang berbeda dan menjadi konflik internal didalam partai politik (Ariefthusa, 2022). Penelitian tersebut juga meneliti bahwa elektabilitas partai Hanura menjadi menurun karena kepemimpinan OSO yang menyebabkan pada tahun pemilu 2019 partai Hanura gagal lolos di Senayan karena kepemimpinan yang diketuai oleh OSO pada saat itu, tetapi konflik internal partai ini sudah lama terjadi sebelum masa pemilu di tahun 2019, tepat pada awal tahun 2018 (Ariefthusa, 2022).

Dengan merosotnya suara partai Hanura, OSO selaku Ketua Umum Partai Hanura menegaskan bahwa partainya gagal memenuhi persentase batas parliamentary Threshold yang disebabkan ulah dari Wiranto sendiri yang dimana telah membiarkan partainya dan hanya mengurus urusan pribadinya sebagai Menko polhukam pada pemerintahan presiden Jokowi tahun 2016 sampai tahun 2019 saat itu. Ia menambahkan apabila publik bertanya-tanya mengapa partai Hanura gagal meloloskan dan mengapa mengalami kekalahan di Pemilu legislatif 2019 yaitu silahkan masyarakat tanyakan langsung kepada Wiranto, melainkan bukan bertanya kepada OSO karena kekalahan Hanura disebabkan oleh Wiranto. Berpindah pandangan dari sisi Wiranto, ia mengaku

menyesal menetapkan dan memilih OSO menjadi Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi pada Desember 2016 lalu. Ia mengaku kesalahan terbesarnya adalah menjadikan OSO selaku yang memimpin partai Hanura pada saat itu. Disambung dengan penelitian terdahulu yaitu setelah Presiden Jokowi menetapkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan didalam kabinet Presiden Jokowi pada tahun 2016, Wiranto menunjuk OSO sebagai pengganti ia untuk menjadi pemimpin partai Hanura berstatus aklamasi sebagai ketua umum pada saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh petinggi dan penasihat partai Hanura (Ariefthusa, 2022).

Akibat dari pergantian kepemimpinan ini, partai Hanura menjadi pecah suara dan memiliki 2 kubu, kubu dari Oesman Sapta Odang dan kubu dari Daryatmo. Kubu Daryatmo merupakan sekumpulan kader partai Hanura yang tidak setuju jika OSO dijadikan sebagai ketua umum karena mereka menganggap bahwasannya kepemimpinan OSO tidak sejalan dengan kepemimpinan yang sudah dijalankan oleh Ketua Umum sebelumnya, yaitu Wiranto. Berbagai aksi dan tindakan yang dilakukan oleh kubu

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana strategi partai politik Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang?
2. Bagaimana strategi partai politik Hanura saat kepemimpinan Oesman Sapta Odang?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi partai politik Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dan bagaimana strategi partai politik Hanura saat kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

Daryatmo untuk menurunkan OSO dari ketua umum sedangkan dari kubu OSO sendiri menganggap bahwa untuk menurunkan OSO dari ketua umum dan digantikan oleh Daryatmo tidak sah dikarenakan harus mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya tindakan untuk menurunkan OSO dari jabatan ketua umum partai menjadi aksi yang gagal dan sampai saat ini OSO masih menjabat diri sebagai ketua umum partai Hanura.

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui strategi seperti apa yang digunakan partai politik Hanura dalam menghadapi pemilu pada tahun 2024. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dipersiapkan oleh partai Hanura untuk mengembalikan masa kejayaan partainya untuk meloloskan kembali ambang Parliametary Threshold seperti pada masa pemilu 2014 sebelumnya dengan hasil persentase minimal 4% agar dimana para kadernya yang mencalonkan sebagai calon legislatif dapat berhasil dan lolos masuk di Senayan serta dapat memenangkan kembali pemilu pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Febuari 2024 mendatang

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertempat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Subjek penelitian yang dipilih sebagai narasumber terdapat para pimpinan partai seperti Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Penasihat, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, dan beberapa kader partai Hanura. Jenis data yang digunakan dengan wawancara, audio rekaman dan dokumen-dokumen.

Sumber data pada penelitian ini terbagi data primer yang dimana didapatkan secara

langsung yang merupakan sebagai narasumber dengan menggunakan pengumpulan data dan memperoleh informasi, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu dengan memperoleh informasi dari dokumen-dokumen data informasi yang dapat membantu memecahkan permasalahan. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara *face to face* dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data yang dilakukan penelitian menggunakan dan menghubungkan teori yang digunakan pada hasil dari data kualitatif.

## **KERANGKA TEORI**

### **Sistem Kepartaian**

(Heywood, 2002) dalam kutipan (Partono, 2008) sistem kepartaian dalam politik merupakan sebuah hubungan dari interaksi para partai politik pada sebuah sistem partai politik yang berlangsung. Sistem kepartaian memberikan bagaimana refleksi dan cerminan mengenai struktur persaingan antara partai politik yang berupaya mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Sistem kepartaian yang digunakan di sebuah negara terdapat tiga model sistem, diantaranya terdapat sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem multipartai dapat tercipta atau dihasilkan apabila sistem proporsional dapat dikombinasikan dengan daerah pemilihan besar karena partai kecil juga memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi (Fitriyah, 2012).

Sistem multipartai sendiri memiliki ciri yaitu didalam sebuah negara tidak terdapat satu atau dua partai yang memiliki kekuatan yang cukup, oleh karena itu partai-partai yang berkoalisi dengan partai lain dan jumlah partai yang dominan di Indonesia yaitu lebih dari dua partai. Sistem pemilu atau electoral laws memiliki konsekuensi terhadap derajat keterwakilan atas hasil-hasil pemilu, sistem kepartaian, serta sistem pemerintahan yang

diinginkan (Fitriyah, 2012). Sistem kepartaian tercipta karena munculnya rivalitas antar partai. (Partono, 2008) juga menambahkan sistem politik yang diterapkan Indonesia menuai sistem presidensial dan sistem multi partai menjadikan muncul ketidakharmonisan karena antara legislatif dengan eksekutif. Oleh karena itu, dengan diadakan kompetisi pemilu yang dimana menjadikan sebuah nilai implementasi negara dalam menjaga keharmonisan antara pemerintah maupun yang diperintah.

Sistem kepartaian dituntut untuk dapat memberikan hasil yang ideal dalam tahap implementasi yang efektif, terutama bagi pemerintah (Sudarsa, 2008). Pemilu pada masa orde baru memedomani pada UU No. 15 Tahun 1969 yang semula muncul gagasan menggunakan sistem distrik, tetapi ditolak dengan alasan dikhawatirkan akan mengurangi kekuasaan pimpinan partai politik, serta muncul ide baru duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen (Fitriyah, 2012).

### **Manajemen Partai Politik**

Pada dasarnya, manajemen partai politik adalah elemen penting dalam mengelola sebuah partai politik (Agatha, 2022). Adanya manajemen dalam partai politik, dapat memudahkan berbagai bentuk kepengurusan dalam partai politik. Teori politik merupakan generalisasi dari sesuatu hal yang bersifat politik dan berbagai konsep yang dibahas mencakup sosial, masyarakat, pemerintahan, kekuasaan, pembangunan politik, dan aspek kelas sosial politik lainnya. Partai politik menurut (Jumadi, 2014) akomodasi partai yang dimana menjadi perangkat demokrasi ketika sebuah partai politik dapat memaksimalkan kualitas dan taraf dari demokrasi.

(Rosana, 2012) Pembangunan politik tidak hanya sebagai perubahan politik, tetapi menjadikannya sebagai pemekaran dari kesadaran politik dalam masyarakat yang

menjunjung nilai keadilan. (Knapp & Meny, 1998) dalam kutipan (Utama, 2022) berpendapat bahwasannya partai politik berfungsi sebagai tempat untuk rekrutmen politik dan menjadi instrumen integrasi. Pada situasi politik ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran di kebanyakan negara yang mendorong reformasi yang menyebabkan runtuhnya masa orde baru dan alih bentuk besar dalam partai-partai politik di negara tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwasannya demokratisasi dan kelangsungan dalam bentuk kebebasan berekspresi memajukan semangat separuh lapisan masyarakat saat itu, termasuk keinginan untuk membentuk partai politik (Sudrajat, 2016). Kemudian, negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang menganut demokrasi, peran fungsinya akan menjadi tolak ukur dan apakah akan menjadi identitas tambahan dari mekanisme politik demokratis ataukah hanya peran tersebut mempunyai arti peran penting untuk masyarakat. (Hutagalung, 2017) Partai politik seringkali memprioritaskan kepentingan kekuasaan daripada mengedepankan kepentingan masyarakat yang dimana partai tersebut dapat eksis karena dipilih oleh masyarakat.

Manajemen partai politik mencakup berbagai dimensi yang saling terkait dan berperan penting dalam mencapai tujuan partai tersebut. Berikut adalah beberapa dimensi utama dalam manajemen partai politik:

#### **A. Dimensi Organisasi**

Manajemen partai politik perlu melibatkan struktur organisasi yang jelas dan efektif. Ini mencakup pembagian tugas, hierarki, dan pembentukan berbagai unit atau bagian dalam partai, seperti departemen kepemudaan, keuangan, atau kaderisasi. Struktur organisasi yang baik akan membantu pengambilan

keputusan dan koordinasi antar bagian dalam partai.

#### **B. Dimensi Kepemimpinan**

Kepemimpinan dalam manajemen partai politik sangat penting untuk mengarahkan dan memotivasi anggota partai. Pemimpin partai perlu memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan strategis, dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai elemen dalam partai dan dengan masyarakat.

#### **C. Dimensi Kaderisasi**

Kaderisasi adalah proses penting dalam partai politik untuk menghasilkan pemimpin masa depan dan memastikan kontinuitas dalam peran dan tujuan partai. Manajemen kaderisasi mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kader partai, sehingga mereka memiliki kompetensi dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan visi partai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN STRATEGI PARTAI HANURA SEBELUM KEPEMIMPINAN DAN SAAT KEPEMIMPINAN OESMAN SAPTA ODANG**

### **1. Strategi Partai Hanura Sebelum Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

#### **A. Organisasi Sebelum Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

Pada masa awal pendiriannya, struktur organisasi Partai Hanura difokuskan untuk membangun fondasi yang kokoh secara administratif dan legalitas. Hal ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi awal yang dipimpin langsung oleh pendiri partai, Jenderal (Purn.) Wiranto. Organisasi dibangun dengan pendekatan yang sangat sistematis dan terpusat, dengan tujuan utama memastikan terbentuknya struktur partai dari

tingkat pusat hingga daerah, serta mendapatkan pengakuan formal dari negara dan publik. Pada periode awal berdirinya Partai Hanura, pola komunikasi internal cenderung bersifat top-down atau satu arah dari pimpinan pusat ke daerah.

Komunikasi ini dirancang sebagai bagian dari sistem kontrol yang terstruktur untuk menjaga arah ideologis dan konsistensi pelaksanaan program di seluruh tingkatan organisasi. Pada masa awal pendirian Partai Hanura, struktur organisasi dibangun dengan karakter yang sangat terpusat pada elite partai di tingkat pusat. Hal ini mencerminkan fase konsolidasi awal di mana fokus utama adalah pembentukan legalitas partai, penyusunan AD/ART, dan penetapan garis besar kebijakan ideologis. Dalam hal ini, kewenangan pengambilan keputusan dan arah strategi politik lebih banyak berada di tangan pimpinan inti yang berada di lingkaran pusat.

Pada masa sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Partai Hanura masih berada dalam fase awal pembentukan organisasi, di mana konsolidasi internal menjadi salah satu tantangan utama. Proses pembangunan struktur partai dari pusat hingga daerah belum sepenuhnya mapan, dan banyak agenda organisasi yang berfokus pada legalitas dan penguatan dasar kelembagaan. Komunikasi lintas struktur antara pengurus pusat dan daerah juga menjadi hambatan karena mengikuti pola komunikasi struktural yang ketat dan berjenjang.

## **B. Kepemimpinan Sebelum Oesman Sapta Odang**

Partai Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) berada di bawah kendali pendirinya yaitu Jenderal (Purn.) Wiranto yang dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang sistematis dan birokratis. Kepemimpinan Wiranto menekankan pentingnya ketertiban

organisasi dan pengelolaan partai secara terstruktur. Hal ini tercermin dari model komunikasi antara pusat dan daerah yang dijalankan secara formal dan hirarkis. Pola pengambilan keputusan pada masa tersebut juga cenderung tersentralisasi, dengan dominasi dari jajaran elite partai di pusat. Dalam hal penyusunan strategi pemenangan pemilu dan kebijakan internal partai, pola komunikasi dan koordinasi lebih bersifat satu arah.

Keterbatasan ruang dialog menyebabkan aspirasi kader di tingkat bawah seringkali tidak tersampaikan secara langsung, sehingga menciptakan jarak emosional dan struktural antara pusat dan daerah. Dalam hal organisasi politik yang masih dalam tahap konsolidasi seperti Hanura saat itu, pendekatan ini dipandang sebagai upaya membangun tata kelola yang kuat dan rapi. Seiring perkembangan politik dan meningkatnya kompleksitas dinamika daerah, pendekatan yang sangat birokratis ini menjadi kurang fleksibel dalam menjawab kebutuhan aktual di lapangan.

## **C. Kaderisasi Sebelum Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

Pada masa sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), sistem rekrutmen Partai Hanura sangat kental dengan pendekatan loyalitas personal dan keterikatan pada elite partai. Mekanisme penerimaan anggota baru dan kaderisasi lebih banyak bergantung pada hubungan kedekatan struktural atau personal dengan pimpinan partai pusat, sehingga terbentuk struktur internal yang cenderung homogen dan tertutup. Model rekrutmen yang berfokus pada loyalitas ini berdampak pada terbatasnya keragaman dan inovasi dalam kaderisasi. Karena proses seleksi lebih diarahkan pada kesetiaan terhadap elite ketimbang kapasitas atau integritas kader, maka peluang untuk munculnya pemimpin

baru dari kalangan akar rumput menjadi sempit.

Pada masa kepemimpinan sebelum Oesman Sapta Odang (OSO), sistem kaderisasi Partai Hanura masih sangat tersentralisasi, sehingga kader-kader di daerah belum memiliki ruang partisipasi yang memadai dalam menentukan arah kebijakan dan rekrutmen partai. Proses kaderisasi dijalankan secara top-down dan lebih berorientasi pada keputusan struktural yang berasal dari elite pusat. Yang menunjukkan bahwa daerah belum diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem kaderisasinya sendiri. Hal ini membuat pengembangan kader menjadi lambat dan tidak merata, karena program-program penguatan kapasitas kader masih terpusat di Jakarta dan belum menjangkau kebutuhan lokal. Minimnya ruang partisipasi kader daerah juga tercermin dari terbatasnya kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam menjangkau kader baru.

Sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Hanura cenderung bersifat elitis dan sangat terpusat. Proses pembinaan kader lebih banyak berpusat di lingkaran elite pusat partai, dengan prioritas pada aktor-aktor yang memiliki kedekatan personal dengan pimpinan atau yang telah memiliki posisi dalam struktur awal partai. Pendekatan ini wajar dalam konteks masa awal pendirian partai, di mana stabilitas dan loyalitas struktur menjadi hal utama. Proses rekrutmen pun tidak terbuka luas bagi publik atau kelompok masyarakat non-elite. Sebagian besar kader yang direkrut berasal dari lingkaran internal yang telah dikenal oleh pengurus pusat, sehingga sistem kaderisasi tidak bersifat partisipatif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara struktur pusat dan daerah, serta membatasi diversitas kader yang bergabung. Muncul citra bahwa Hanura saat itu lebih sebagai partai yang eksklusif dan hierarkis dalam menentukan

arah pengembangan kader, dengan keterbatasan akses dan ruang kontribusi bagi generasi baru maupun tokoh-tokoh lokal yang potensial.

## **2. Strategi partai Hanura di Bawah Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

### **A. Organisasi di Bawah Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang (OSO) menjalankan struktur organisasi melalui pendekatan yang terencana dan sistematis dengan menerapkan prinsip 5S: Struktur, Sistem, Skill, Speed, dan Target. Prinsip ini menjadi kerangka kerja utama dalam membangun organisasi partai yang solid, adaptif, dan berorientasi pada hasil. OSO menekankan pentingnya struktur partai yang jelas dan hirarkis, sistem kerja yang efisien, peningkatan keterampilan kader, kecepatan dalam merespons dinamika politik, serta pencapaian target elektoral yang terukur. Prinsip ini mencerminkan transformasi manajerial partai dari yang bersifat elitis menjadi organisasi politik yang lebih profesional dan kompetitif.

Implementasi prinsip 5S juga mendorong perubahan mendasar dalam pola kerja internal partai. Struktur organisasi yang sebelumnya kaku diubah menjadi lebih fungsional dan dinamis. Sistem koordinasi antarbagian diperkuat dengan alur komunikasi yang lebih cepat dan terbuka, termasuk penggunaan teknologi informasi. Kaderisasi diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan melalui pelatihan rutin dan penugasan berbasis kemampuan. Prinsip speed dan target menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan

serta evaluasi kinerja kader, dari pusat hingga tingkat ranting.

Dengan kerangka 5S, Hanura di bawah OSO tidak hanya menata ulang organisasi, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, cepat tanggap, dan berorientasi pada pencapaian tujuan partai. Kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) membawa perubahan fundamental dalam cara kerja organisasi Partai Hanura. Struktur partai yang sebelumnya lebih bersifat administratif dan simbolik, dihidupkan menjadi alat kerja yang fungsional dan responsif terhadap dinamika politik nasional maupun lokal. Hal ini tercermin dalam upaya OSO menjadikan struktur organisasi sebagai instrumen penggerak program kerja, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

Bahkan kebijakan dan strategi partai kerap dirumuskan dengan memperhatikan masukan dari bawah ke atas (bottom-up) yang memperlihatkan bagaimana organisasi Hanura di bawah OSO tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjawab kebutuhan politik dan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, OSO mengubah wajah Partai Hanura menjadi organisasi politik yang bekerja secara nyata, adaptif terhadap dinamika zaman, dan mampu menjangkau aspirasi rakyat secara lebih konkret dan cepat. Salah satu strategi penting yang diusung Oesman Sapta Odang (OSO) dalam memimpin Partai Hanura adalah menciptakan keseimbangan antara struktur pusat dan daerah. Tidak seperti pola sebelumnya yang lebih tersentral di tingkat elite pusat, OSO memberikan ruang yang lebih luas bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk memainkan peran strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan partai.

## **B. Kepemimpinan di Bawah Oesman Sapta Odang**

Kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Partai Hanura dicirikan oleh pendekatan partisipatif dan dialogis, yang berbeda secara signifikan dari pola kepemimpinan sebelumnya yang lebih bersifat top-down. OSO mendorong keterlibatan aktif kader dari berbagai tingkatan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya mendorong partisipasi, OSO juga membuka ruang diskusi yang sehat di dalam partai, di mana perbedaan pandangan dianggap sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) mengalami pergeseran dalam pola pengambilan keputusan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi lebih kolektif dan partisipatif. OSO mendorong keterlibatan semua unsur dalam partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan. Kebijakan-kebijakan penting yang diambil selama kepemimpinan OSO hampir selalu melewati proses koordinasi dan musyawarah, yang melibatkan berbagai level organisasi.

Gaya kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Partai Hanura dikenal tegas, sentralistik, dan berorientasi pada efisiensi keputusan. Sebagai tokoh yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha sekaligus politisi senior, OSO membawa pendekatan manajerial dalam mengelola partai, dengan menekankan kedisiplinan organisasi dan loyalitas terhadap garis kepemimpinan pusat. OSO cenderung menggunakan gaya kepemimpinan instruksional, di mana pengambilan keputusan lebih banyak dikendalikan dari tingkat pusat dan langsung diarahkan ke struktur bawah.

Pengaruh gaya kepemimpinan OSO terhadap struktur partai cukup signifikan, terutama dalam proses penataan ulang jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat hingga daerah. Banyak posisi penting diisi oleh kader-kader yang dianggap sejalan dan loyal terhadap visi kepemimpinannya. Hal ini membuat struktur partai menjadi lebih terkonsolidasi namun sekaligus memunculkan kecenderungan homogenitas dalam pengambilan keputusan. Meskipun gaya kepemimpinannya berhasil menstabilkan internal partai dalam jangka pendek, muncul kritik bahwa sentralisasi kekuasaan mengurangi ruang aspirasi kader dari daerah (Azmi, 2022). OSO tetap berupaya menguatkan identitas Hanura sebagai partai yang solid dan siap bersaing dalam kontestasi nasional, terutama menghadapi Pemilu 2024.

### **C. Kaderisasi di Bawah Kepemimpinan Oesman Sapta Odang**

Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) menempatkan sistem kaderisasi sebagai pilar utama dalam membangun kekuatan partai yang berkelanjutan. Tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis atau popularitas, Partai Hanura mengedepankan nilai-nilai kejujuran, pengabdian, dan hati nurani dalam proses pembinaan kader. Kaderisasi Hanura dilakukan secara holistik, dengan menekankan pelatihan ideologi, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan pengalaman langsung di lapangan. Proses kaderisasi menjadi wadah pembentukan karakter, bukan sekadar proses administratif atau politis. Pendekatan berbasis nilai ini menciptakan kader yang tidak hanya loyal pada partai, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam menjalankan fungsi politiknya di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi penguatan kaderisasi jangka panjang, Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) merancang pendirian Hanura Institute. Lembaga ini direncanakan sebagai pusat pendidikan politik internal partai yang bertujuan untuk mencetak kader-kader unggul dengan integritas dan kompetensi yang seimbang. Hanura Institute dirancang untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin muda yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat basis ideologis partai.

Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan komitmennya terhadap sistem kaderisasi yang inklusif, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan, pemuda, dan kelompok marginal untuk terlibat aktif dalam politik. Pendekatan ini tercermin dari kebijakan rekrutmen yang tidak lagi bersifat elitis dan tertutup, melainkan terbuka terhadap berbagai latar belakang sosial. Dalam menghadapi Pemilu 2024, Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang (OSO) menekankan pentingnya sinergi antarstruktur dan program sebagai kunci keberhasilan strategi pemenangan. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme koordinasi berjenjang dan sistem pelaporan dari tingkat pusat (DPP), daerah (DPD dan DPC), hingga akar rumput (ranting).

Salah satu strategi utama Partai Hanura dalam menghadapi Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang (OSO) adalah penempatan kader secara tepat berdasarkan data dan kapabilitas. Strategi ini mencerminkan pendekatan meritokratis dan rasional dalam menentukan posisi kader di berbagai tingkatan. Dalam menghadapi Pemilu 2024, Partai Hanura menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dan

berjenjang, yang dikenal sebagai sistem pengawasan berbasis struktur piramida. Sistem ini menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari strategi pemenangan, dengan alur koordinasi yang dimulai dari tingkat anak ranting sebagai basis terbawah hingga ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dengan pengawasan ini, Hanura mampu mendeteksi kendala secara dini serta menjaga konsistensi implementasi strategi di seluruh tingkatan partai.

### **KESIMPULAN**

Strategi Partai Hanura menunjukkan model kepemimpinan yang lebih terpusat pada figur pendiri dengan struktur formal dan birokratis. Fokusnya ada pada konsolidasi kelembagaan dan stabilitas internal. Pendekatan ini berhasil membangun identitas awal partai dan membawa Hanura masuk parlemen pada Pemilu 2009 dan 2014, tetapi masih terbatas pada partisipasi kader akar rumput dan pemanfaatan teknologi kampanye modern.

Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak OSO mengalami transformasi signifikan dalam strategi politik dan kelembagaan. Kepemimpinan OSO ditandai dengan gaya partisipatif, dialogis, serta pengambilan keputusan kolektif yang mengedepankan musyawarah. Reformasi struktur organisasi dijalankan melalui prinsip 5S (Struktur, Sistem, Skill, Speed, Target), menjadikan partai lebih fungsional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Komunikasi antara pusat dan daerah berlangsung secara cair, terbuka, dan bersifat dua arah. DPD dan DPC dilibatkan aktif dalam penyusunan strategi dan kaderisasi, dengan pelibatan nyata perempuan, pemuda, dan kelompok marginal. Meskipun demikian strategi yang digunakan sudah dirancang dengan sistem yang berbeda, pada pemilu 2024, partai Hanura kembali tidak lolos di parlemen karena kurang dari 4%.

Perbandingan kedua kepemimpinan yang memiliki periode masing-masing

menunjukkan bahwa baik kepemimpinan Wiranto maupun Oesman Sapta Odang (OSO) sama-sama memiliki kontribusi dan kelemahan masing-masing. Era Wiranto memberikan fondasi struktural dan identitas awal partai, sedangkan era OSO mencoba memperbarui metode dan memperluas partisipasi kader. Namun, hingga menjelang Pemilu 2024, Partai Hanura masih menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memenuhi ambang batas parlemen. Artinya, strategi yang lebih inklusif dan modern di era OSO belum tentu langsung menghasilkan elektabilitas tinggi, tetapi menjadi pijakan penting untuk transformasi jangka panjang.

### **SARAN**

Partai Hanura disarankan untuk mempertahankan pendekatan kepemimpinan partisipatif dan komunikasi dua arah yang telah diterapkan selama masa kepemimpinan Bapak Oesman Sapta Odang, karena strategi ini terbukti memperkuat sinergi antara struktur pusat dan daerah serta meningkatkan partisipasi kader dalam perumusan kebijakan dan strategi pemenangan.

Kader dan pengurus partai di seluruh tingkatan disarankan untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan loyalitas terhadap visi dan misi Partai Hanura dengan cara menyuarakan gagasan strategis yang membangun, serta menjadikan ruang partisipatif yang dibuka oleh kepemimpinan OSO sebagai momentum untuk membentuk solidaritas dan semangat gotong royong.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus kajian terhadap strategi partai politik di Indonesia dengan membandingkan pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang berbeda, baik dari sisi ideologis, struktural, maupun kultural. Penelitian mendatang dapat mengkaji lebih mendalam perbandingan antar partai dalam merespons dinamika elektoral, khususnya

dalam konteks kaderisasi perempuan, pemuda, dan kelompok marginal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, R. (2022, 13 Desember). *Faktor Strategis Dalam Manajemen Partai Politik: Studi Kasus Pengelolaan Partai-Partai Politik Modern di Indonesia*. Diakses pada 11 Desember 2023, dari <https://www.kompasiana.com/rossenn eoetaria/63987d8f4addee26ed7efa82/f aktor-strategis-manajemen-partai-politik>.
- Ariefthusa, A. (2022). Konflik Internal Partai Politik Studi Kasus: Dualisme Partai Hanura Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Nasional.
- Fitriyah. (2012). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- House of Representatives of the Republic of Indonesia. (n.d.). Keterangan public 128. Diakses 28 September 2023, dari <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-128.pdf>
- Hutagalung, C. (2017). Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Jumadi, R. (2014). Strategi Partai Hanura Dalam Mendapatkan Dukungan Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilu 2014. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Partono. (2008). Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5(1), 2-3.
- Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 8(1), 9.
- Sudarsa, A. (2008). Sistem Multipartai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5(1), 4-7.
- Sudrajat, T. (2016). Penerapan Manajemen Strategik Untuk Partai Politik Pada Era Demokratisasi: Tantangan, Permasalahan dan Prospek, *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol 13(2), 2.
- Utama, M. (2022). Peran Partai Gerindra di Kota Semarang Terhadap Lingkungan Hidup. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.